

PENGENDALIAN STUNTING DAN GIZI BURUK

Eva Nurfadilah¹, Aulia Romadhon², Alifa salsabila³

evanurfadillah7@gmail.com¹, aularmdhn590@gmail.com², salsabilacaca23@gmail.com³

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

ABSTRAK

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Di Indonesia, jumlah balita gizi buruk menurut Riskesdas 2018 masih sebesar 17,7%. Berbagai faktor yang mempengaruhi kejadian gizi buruk, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini merupakan sebuah studi kasus terhadap seorang balita berusia 30 bulan di desa Punt Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara tahun 2022 dengan keluhan berat badan serta tinggi badan yang sulit naik. Berdasarkan pemeriksaan fisik didapat berat badan 8,65 kg serta tinggi badan 80 cm, sehingga berdasarkan z- score didapat BB/U < dari -3SD (Gizi buruk), TB/U < dari -3SD (Sangat pendek), dan BB/T -3SD sampai dengan < - 2 SD (Kurus). Pasien diberikan tatalaksana secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Berdasarkan kasus diperoleh beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya gizi buruk dan stunting pada pasien yaitu status ekonomi, pendidikan orang tua, perilaku orang tua terhadap makanan, jumlah anggota keluarga, sanitasi rendah, dan berat badan lahir rendah.

Kata Kunci: Berat badan, gizi buruk, Tinggi badan.

ABSTRACT

Malnutrition is the worst form of chronic malnutrition. In Indonesia, the number of malnourished children under five according to Riskesdas 2018 is still 17.7%. Various factors influence the incidence of malnutrition, both directly and indirectly. This research is a case study of a 30 month old toddler in Punt Matang Kuli village, North Aceh Regency in 2022 with complaints of difficulty gaining weight and height. Based on physical examination, it was found that the body weight was 8.65 kg and the body length was 80 cm, so that based on the z-score, it was found that BB/U was < -3SD (poor nutrition), TB/U < -3SD (very short), and BB/H -3SD up to < - 2 SD (Skinny). Patients are given promotive, preventive, curative and rehabilitative treatment. Based on the cases, several factors were found that could cause malnutrition and stunting in patients, namely economic status, parental education, parental behavior towards food, number of family members, low sanitation and low birth weight.

Keywords: Waste body weight, poor nutrition, body length.

PENDAHULUAN

Pemerintah Provinsi Banten Al Muktabar fokus untuk mengendalikan angka prevalensi stunting atau kekerdilan yang dialami anak usia bawah lima tahun (balita) serta masalah gizi buruk. "Pengendalian itu sesuai harapan Bapak Presiden Joko Widodo," kata Pejabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar di Serang, Senin. Berdasarkan data angka stunting di Provinsi Banten sampai Maret 2023 menurun 20,1 persen sehingga pemprov memastikan target 14 persen 2024 bisa direalisasikan sesuai harapan Presiden Joko Widodo. Selain itu, katanya, pengendalian lainnya adalah soal, inflansi serta komitmen bangga buatan Indonesia dan bangga wisata Indonesia. Kemudian, juga pengendalian indikator - indikator ekonomi makro yang dilaporkan kepada pemerintah pusat dan dikondisikan dengan baik di Provinsi Banten. Pihaknya mengajak masyarakat agar menanam cabai di pekarangan rumah, karena cabai itu bisa memicu inflasi.

Bahkan, para pelaku UMKM beberapa bulan lalu inflasi di Kota Serang cukup tinggi, namun sekarang mulai bisa dikendalikan dengan baik. Pelaku UMKM itu juga mendapatkan penghargaan dari Menteri Keuangan dan diberikan dana insentif pembiayaan. "Kita berharap ke depan pengendalian - pengendalian itu bisa bermuara pada kesejahteraan masyarakat Banten menjadi lebih baik,"katanya. Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Banten juga mengoptimalkan pelayanan dasar, seperti sektor pendidikan dan kesehatan. Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan terus ditingkatkan, termasuk derajat kesehatan masyarakat untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Apabila, pelayanan dasar itu terpenuhi dipastikan dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang memadai, sehingga dapat membebaskan stunting dan gizi buruk,"kata gubernur menambahkan. Ia mengatakan Pemprov Banten juga menggandeng berbagai kementerian, investor maupun perusahaan swasta untuk menyerap lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Sebab, penyerapan lapangan pekerjaan diperlukan karena dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Pemprov mengapresiasi terhadap Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang begitu komitmen membangun sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah ini. Bahkan, penyerapan lapangan pekerjaan cukup besar dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. "Kami meyakini lapangan pekerjaan itu bisa mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat," demikian Al Muktabar.

Provinsi Banten merupakan salah satu lokus prioritas percepatan penurunan stunting. Meskipun telah terjadi penurunan prevalensi stunting, tetapi dengan jumlah absolut penduduk yang besar membuat penanganan stunting di Banten menjadi salah satu prioritas. Berdasarkan data SSGI, pada tahun 2021 prevalensi stunting di Banten sebesar 24,5 persen dan pada tahun 2022 prevalensi stunting turun menjadi 20 persen, turun sebesar 4,5 persen dibandingkan tahun 2021. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Y.B Satya Sananugraha menyatakan, hasil positif yang dicapai oleh Provinsi Banten berkat langkah strategis dan praktik baik yang telah memberikan efek signifikan dalam percepatan penurunan stunting. Satya menyatakan, dari hasil kunjungan dan evaluasi di lapangan khususnya di Serang, kolaborasi, kerjasama, integrasi kegiatan percepatan penurunan stunting oleh OPD dan Tim Percepatan Penurunan Stunting sudah dilakukan dengan baik. Seperti program Dapur Sehat Atasi Stunting (DAHSAT) di Posyandu, kemudian program PAUD HI pelaksanaan aksi bergizi dan skrining anemia, juga pemberian pil tablet tambah darah pada remaja putri sudah rutin dilakukan.

Lebih lanjut, menurut Satya, masih ada permasalahan yang menjadi kendala bagi Provinsi Banten untuk mempercepat penurunan stunting, seperti masih ada beberapa daerah dengan akses air bersih yang terbatas, kemudian juga akses air minum layak dan sanitasi. Dalam hal ini Satya mengatakan akan membawa permasalahan tersebut ke Kementerian PUPR untuk diberikan program intervensi.

Satya mengharapkan Provinsi Banten semakin mengebut program percepatan penurunan stunting dan fokus pada indikator yang cakupannya masih jauh dari target dan perlu dukungan dari semua pihak. Seperti pemenuhan asupan gizi tambahan, pencegahan pernikahan dini, pencegahan perilaku buang air sembarangan, serta sosialisasi pentingnya gizi dan pencegahan stunting. Kemudian juga diharapkan seluruh fasilitas kesehatan di Provinsi Banten yakni Puskesmas dan Posyandu bisa memenuhi USG dan Antropometri, serta melatih kader dan tenaga kesehatan dalam menggunakan alat tersebut. Pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Tim

Pendamping Keluarga dari tingkat provinsi hingga desa. Selanjutnya, diharapkan pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota memastikan semua keluarga berisiko stunting masuk dalam DTKS untuk mendapatkan bansos. Edukasi dan konseling terus dilakukan kepada masyarakat secara massif tentang pemenuhan gizi dan pola asuh, meningkatkan dukungan dari perguruan tinggi, dunia usaha dan organisasi keagamaan dalam upaya percepatan penurunan stunting, serta dukungan dari Kementerian dan Lembaga. Di kesempatan terpisah, Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Banten Virgojanti menyampaikan bahwa Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Banten terus memperkuat penanganan stunting melalui pendekatan multisektor dan multipihak. Virgojanti menyampaikan, dukungan anggaran penanganan stunting Provinsi Banten mencapai Rp739.082.950.322 yang berada di 20 OPD dan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, APBN, CSR, DAK fisik dan DAK non fisik serta dana lainnya. Ditambahkannya, penanganan intervensi spesifik yang sudah mencapai target adalah indikator tablet tambah darah bagi remaja putri dan Balita Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) tertinggi pertama se-Indonesia pemberian makanan pendamping ASI. Kemudian ada juga yang masih dalam proses seperti skrining anemia, PMT Bumil KEK, PMT gizi kurang. Kemudian, untuk capaian intervensi spesifik secara umum sudah tercapai dengan baik. Namun masih ada indikator yang belum memenuhi target seperti calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah dan target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas.

Virgojanti menyampaikan, Keluarga berisiko stunting di Provinsi Banten sebanyak 532.580 keluarga berdasarkan hasil pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2022. Virgojanti mengatakan, dengan adanya anggaran stunting tersebut diharapkan bisa mempercepat penanganan stunting dan bisa mencapai target penurunan menjadi 14 persen pada tahun 2024. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) yang diikuti oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah dari Kabupaten Serang, Lebak, Pandeglang, Tangerang, Kota Serang, Cilegon, Tangerang, dan Tangerang Selatan. Dalam kesempatan FGD juga hadir para narasumber dari kementerian dan lembaga, dari Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, Kementerian Kominfo, Kemendes PDTT, Kementerian Agama, Kementrian Keuangan, Bappenas, BKKBN. Dalam kegiatan FGD seluruh OPD Provinsi Banten antusias dalam berdiskusi, menyampaikan kendala penanganan stunting, masalah yang dihadapi pada para narasumber. Kemudian dari kegiatan didapatkan hasil rekomendasi evaluasi kebijakan penanganam stunting untuk para OPD yang mencakup penanganan tata kelola, intervensi spesifik dan sensitif. Para OPD kemudian menyetujui dan akan menindaklanjuti hasil evaluasi yang akan dilaksanakan untuk mempercepat penanganan stunting.

KAJIAN PUSTAKA

Pengendalian

Pengendalian menjadi fungsi keempat dan merupakan bagian ujung dan sebuah proses kegiatan. Pengendalian adalah proses untuk membuat sebuah organisasi mencapai tujuannya. Pengendalian menurut Earl P. Strong, controlling is the process of regulating the various factors in an enterprise according to the requirement of its plans. Artinya: pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana.

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses memastikan bahwa tujuan organisasi dan

manajemen tercapai. Hal ini mengacu pada kesempatan untuk melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan. Pengendalian ini sangat erat kaitannya dengan fungsi perencanaan, dan kedua fungsi ini saling melengkapi karena alasan berikut:

- a. Pengendalian harus direncanakan terlebih dahulu
- b. Pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana
- c. Apabila pengendalian dilaksanakan dengan baik maka pelaksanaan rencana akan baik
- d. Setelah melakukan pengendalian atau evaluasi, Anda dapat menentukan apakah tujuan baru berhasil dicapai.

Berdasarkan batasan di atas, terdapat empat langkah dalam pengendalian yaitu sebagai berikut:

- a. Menetapkan standar dan metode untuk mengukur kinerja (establish standard and methods for measuring performance) Menetapkan standar dan metode untuk mengukur kinerja mencakup segala hal mulai dari target penjualan dan produksi hingga catatan waktu dan tempat kerja. Dapat mencakup standar dan pengukuran untuk segala hal mulai dari keselamatan hingga keselamatan. Untuk memastikan efektivitas langkah-langkah ini, Standar harus didefinisikan dengan cara yang bermakna dan dapat diterima oleh mereka yang terkena dampak.
- b. Pengukuran Kinerja (Performance Measurement) Langkah pengukuran kinerja merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan berulang-ulang, yang frekuensi sebenarnya tergantung pada jenis kegiatan yang diukur.
- c. Membandingkan Kinerja dengan Standar (Comparing Performance to Standards) Membandingkan kinerja membandingkan hasil yang diukur dengan tujuan atau standar yang telah ditetapkan. Jika kinerja dapat diterima, administrator mengasumsikan bahwa semua beroperasi di bawah kendali. Oleh karena itu, pengurus tidak perlu melakukan intervensi aktif dalam organisasi.
- d. Mengambil tindakan perbaikan (take corrective action). Tindakan ini diambil ketika kinerja berada di bawah standar dan analisis menunjukkan bahwa tindakan diperlukan. Tindakan korektif dapat berupa satu atau lebih aktivitas dalam operasi organisasi atau perubahan terhadap standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajer hanya memantau kinerja dan tidak mengambil kendali kecuali manajer mengikuti proses hingga selesai. Menemukan cara konstruktif untuk memastikan kinerja memenuhi standar dan mengidentifikasi kesalahan yang hilang harus menjadi prioritas.

Stunting Dan Gizi Buruk

Pengertian stunting sendiri adalah permasalahan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam rentang yang cukup waktu lama, yaitu sejak dalam kandungan hingga 1000 (seribu) hari pertama kelahiran bayi. Umumnya permasalahan ini terjadi karena asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting baru akan terlihat ketika anak sudah menginjak usia dua tahun. Sedangkan Gizi Buruk adalah keadaan dimana anak kekurangan konsumsi zat gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi protein dalam makanan sehari-hari, biasanya ditandai dengan berat dan tinggi badan tidak sesuai umur (dibawah rata-rata). Bedanya dengan stunting, yakni gizi buruk bisa terjadi ketika anak kekurangan gizi dalam waktu yang relatif singkat.

Faktor Terjadinya Masalah Lingkungan:

- Teknologi Barry Commoner dalam Rahmadi (2014:6) melihat bahwa teknologi merupakan sumber terjadinya masalah-masalah lingkungan. Terjadinya revolusi dibidang ilmu pengetahuan alam misalnya fisika dan kimia, yang terjadi selama 50 tahun terakhir, telah mendorong perubahan-perubahan besar dibidang teknologi

selanjutnya hasil-hasil teknologi itu diterapkan dalam sector industry, pertanian, transportasi dan komunikasi.

- Pertumbuhan penduduk Ehrlich dan Holdren dalam Rahmadi (2014:7) menekankan bahwa pertumbuhan penduduk dan peningkatan kekayaan memberikan sumbangan penting terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup. Terjadinya kerusakan, disebabkan oleh sistem irigasi yang gagal dan pembukaan lahan yang terus menerus akibat pertumbuhan penduduk sehingga semakin luas lahan pertanian berdasarkan sistem irigasi.
- Motif Ekonomi Hardin dalam Rahmadi (2014:8-9) melihat bahwa alasan- alasan ekonomi yang sering menggerakkan perilaku manusia atau keputusan- keputusan yang diambil oleh manusia secara perorangan maupun dalam kelompok, terutama dalam hubungannya dengan pemanfaatan Common Property. Bebasnya sumber daya alam seperti sungai, danau, laut dan lain lain, dimanfaatkan oleh setiap orang untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing, maka setiap orang berusaha dan berlomba-lomba untuk memanfaatkan atau noneksplorasi sumber daya alam semaksimal mungkin guna perolehan keuntungan pribadi yang sebesar- besarnya.

METODE PENELITIAN

Untuk Tahap perencanaan dimulai dengan mencari data dan informasi mengenai stunting melalui penelusuran artikel jurnal baik berupa hasil penelitian dan pengabdian masyarakat, melakukan studi pendahuluan melalui survei dan observasi tentang stunting di lingkungan masyarakat lokasi kegiatan pengabdian sehingga didapat data primer jumlah balita yang terkena stunting berikut identitas mereka. Setelah melakukan studi pendahuluan dan melihat serta menganalisis urgensi dilakukan kegiatan maka dilakukan perizinan kepada pihak terkait yaitu kepada aparat kelurahan, para kader posyandu serta ibu-ibu yang memiliki anak pengidap stunting. Selanjutnya tahap pelaksanaan yaitu penyuluhan tentang kesehatan penanggulangan stunting diikuti dengan kegiatan tanya jawab antara peserta dan narasumber kegiatan dilanjut kegiatan aksi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) serta pengecekan tinggi badan untuk mendapatkan data bulanan dan berat badan untuk data mingguan anak pengidap stunting sebagai kegiatan monitoring dan evaluasi. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan dengan menggunakan metode Participatory Rural Appraisal (PRA) yang saat ini dikenal sebagai pembelajaran dan tindakan partisipatif (participatory learning and Action/PLA) yang terdiri dari tiga pilar yaitu metode, sikap dan perilaku, serta berbagi. Berbagi adalah prinsip utama PRA yaitu berbagi informasi antara orang- orang anggota dengan fasilitator luar dan dengan keahlian berbeda. Praktik PRA bergantung pada sikap dan perilaku yang benar dari para praktisi PRA dimana inti PRA yang baik adalah sikap dan perilaku. Berikut gambar mengenai hubungan antartetiga pilar tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mewujudkan percepatan penurunan stunting yang telah di targetkan oleh Pemerintah sebesar 14% pada tahun 2024, pemerintah sebagai pengarah, regulator dan sebagai pelaksana. Sebagai pengarah pemerintah menetapkan, melaksanakan, dan memantau serta mengkoordinasikan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Sebagai regulator, pemerintah melakukan penyusunan kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan

bermanfaat dalam percepatan penurunan stunting guna mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, serta pencapaian tujuan yang berkelanjutan. Upaya percepatan penurunan stunting terus dilakukan mulai dari Pemerintah Pusat sampai ke Daerah. Pencegahan dan penurunan angka stunting di Indonesia, bukan hanya urusan pemerintah semata. Seluruh elemen bangsa harus terlibat dan berperan aktif percepatan penurunan stunting di Indonesia. Data menunjukkan bahwa penurunan prevalensi stunting di tingkat nasional sebesar 9.2 persen selama periode 5 tahun yaitu 30.8 persen tahun 2018 menjadi 27.7 persen (tahun 2019), 26.9 persen (tahun 2020), 24.4 persen (tahun 2021) dan 21.6 persen (tahun 2022). Pemerintah Provinsi Banten juga berkomitmen dalam percepatan penurunan stunting ditunjukkan dengan Prevalensi Stunting yang dijadikan indikator daerah dan merupakan tematik pembangunan, sehingga penurunan stunting menjadi fokus dan prioritas pembangunan di Provinsi Banten. Hal ini dapat dibuktikan dengan capaian penurunan Prevalensi Stunting tahun 2022 yaitu 20 persen turun 4.5 persen dari tahun 2021 (SSGI, 2022).

Penanganan anak stunting berdasarkan hasil penimbangan bulan Februari 2023, dengan sasaran sebanyak 919.680 anak dengan jumlah yang diukur sebanyak 809.483 anak masih terdapat jumlah anak stunting sebanyak 28.770 anak. Angka stunting yang semula 20,0% mengalami penurunan sebesar 3,6%, sehingga menjadi 15,4%. Data berdasarkan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi berbasis Masyarakat (E-PPGBM) dengan cakupan penimbangan sebanyak 88%. Sedangkan penanganan anak stunting berdasarkan hasil penimbangan bulan Desember 2023, dengan sasaran sebanyak 796.419 anak dengan jumlah yang diukur sebanyak 466.637 anak masih terdapat jumlah anak stunting sebanyak 21.171 anak. Dengan persentase stunting 4.5 %. Data berdasarkan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi berbasis Masyarakat (E-PPGBM) dengan cakupan penimbangan sebanyak 58.5%. Penurunan prevalensi stunting sebagai salah satu indikator sasaran Misi 1 yaitu Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Percepatan penurunan stunting yang merupakan salah satu prioritas RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 yang dibreak down dalam target tahunan yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023. Pendekatan tematik pada RKPD Provinsi Banten 2023 dilaksanakan dalam rangka untuk lebih memprioritaskan (baik fokus maupun lokus) kegiatan, permasalahan permasalahan daerah dan target-target pembangunan dapat terealisasi sesuai dengan apa yang direncanakan. Adapun tematik pembangunan dalam RKPD 2023 adalah sebagai berikut:

1. Ketahanan Pangan Daerah
2. Pengurangan Pengangguran melalui pendidikan vokasi dan Kewirausahaan
3. Percepatan Penurunan Stunting
4. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Cibanten
5. Manajemen Kinerja Pemerintahan. Stunting menjadi salah fokus prioritas pembangunan pada tahun 2023.

Adapun Tematik Percepatan Penurunan Stunting diarahkan melalui strategi dan fokus penanganan sebagai berikut:

- a) Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan;

- c) Peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan,
- d) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Selain menjadikan stunting sebagai prioritas pada Dokumen RPD Provinsi Banten Tahun 2023 2026, RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 dan Rancangan RKPD Provinsi Banten Tahun 2024, stunting juga menjadi salah satu target dalam Rancangan RAD SDG's Provinsi Banten Tahun 2023 2026. Pada Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan dengan indikator Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. Adapun target pada tahun 2023 sebesar 17%, 2024 sebesar 14%, 2025 sebesar 13% dan 2026 sebesar 12%. Dengan masuknya percepatan penurunan stunting menjadi prioritas pada dokumen perencanaan daerah diharapkan target prevalensi stunting 14% di tahun 2024 bisa tercapai.

KESIMPULAN

Pengertian stunting sendiri adalah permasalahan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam rentang yang cukup waktu lama, yaitu sejak dalam kandungan hingga 1000 (seribu) hari pertama kelahiran bayi. Umumnya permasalahan ini terjadi karena asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting baru akan terlihat ketika anak sudah menginjak usia dua tahun. Sedangkan Gizi Buruk adalah keadaan dimana anak kekurangan konsumsi zat gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi protein dalam makanan sehari-hari, biasanya ditandai dengan berat dan tinggi badan tidak sesuai umur (dibawah rata-rata). Bedanya dengan stunting, yakni gizi buruk bisa terjadi ketika anak kekurangan gizi dalam waktu yang relatif singkat. Provinsi Banten merupakan salah satu lokus prioritas percepatan penurunan stunting. Meskipun telah terjadi penurunan prevalensi stunting, tetapi dengan jumlah absolut penduduk yang besar membuat penanganan stunting di Banten menjadi salah satu prioritas. Berdasarkan data SSGI, pada tahun 2021 prevalensi stunting di Banten sebesar 24,5 persen dan pada tahun 2022 prevalensi stunting turun menjadi 20 persen, turun sebesar 4,5 persen dibandingkan tahun 2021. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Y.B Satya Sananugraha menyatakan, hasil positif yang dicapai oleh Provinsi Banten berkat langkah strategis dan praktik baik yang telah memberikan efek signifikan dalam percepatan penurunan stunting. Satya menyatakan, dari hasil kunjungan dan evaluasi di lapangan khususnya di Serang, kolaborasi, kerjasama, integrasi kegiatan percepatan penurunan stunting oleh OPD dan Tim Percepatan Penurunan Stunting sudah dilakukan dengan baik. Seperti program Dapur Sehat Atasi Stunting (DAHSAT) di Posyandu, kemudian program PAUD HI pelaksanaan aksi bergizi dan skreening anemia, juga pemberian pil tablet tambah darah pada remaja putri sudah rutin dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Suadi, Sistem Pengendalian Manajemen, BPFE, Yogyakarta, 1995, hlm. 3
Berita Antara
Gubernur Banten (2023). Banten fokuskan pengendalian stunting dan gizi buruk.
Muktabar Al (2023). Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Banten. Laporan Pro 36 Periode.
Mulyadi Nitisusastro, Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil, ALFABETA, Jakarta, 2010, hlm. 166

PPID (2022). Beda Stunting Dan Gizi Buruk. Diskominfo Sp.
T. Hani Handoko, Manajemen Edisi Kedua, (Yogyakarta: BPFE, 2003), hlm.35